



SALINAN

**WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR
23 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar satuan harga non konstruksi dan standar satuan harga konstruksi dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi

- Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 36. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 37. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
 38. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 39. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor

- 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli;
40. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 42. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
 43. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli;
 44. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
 45. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
 46. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
 47. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

48. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
49. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
50. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli Nomor : 600/184/PUTR/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal : Pengajuan ASB Bidang Bina Marga Dinas PUTR TA 2022.
 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Nomor : 900/57/DPMPSTP/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal : Usulan SBU DPMPSTP Kota Gunungsitoli.
 3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli Nomor : 600/209/PUTR/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal : Pengajuan ASB Bidang Bina Marga Dinas PUTR TA 2022.
 4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli Nomor : 600/261/PUTR/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal : Permohonan Perubahan SSH.
 5. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli Nomor : 520/172/Diskeptan 2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal : Penyampaian Usulan SSH dan ASB TA. 2022.
 6. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli Nomor : 600/614/PUTR/2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal : Usulan Perubahan SBU TA. 2022 dan Tambahan ASB TA. 2022.
 7. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli Nomor : 600/634/PUTR/2022 tanggal 17 Februari 2022 perihal : Penyesuaian Harga Satuan Dexlite TA. 2022.

8. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli Nomor : 912/0928/BKPSDM/2022 tanggal 18 Februari 2022 perihal : Penyampaian Data Usulan Perubahan Nomenklatur SBU dan Penambahan SSH TA. 2023.
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor : 420/1408-Disdik/2022 tanggal 02 Maret 2022 perihal : Perubahan Standar Satuan Harga.
10. Surat Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Nomor : 910/1765/BU/2022 tanggal 11 Maret 2022 perihal : Usul Standar Satuan Harga TA. 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

STANDAR SATUAN HARGA NON KONSTRUKSI TAHUN 2022

ALAT TULIS KANTOR

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Buku Laporan Kegiatan	Jilid Buku Laporan Kegiatan	Paket	Rp. 300.000
2	Bahan Praktek	Bahan Praktek untuk Pelatihan Tematik	Kali	Rp. 350.000

ALAT KANTOR LAINNYA

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Filling Kabinet	Bahan Plat Besi Laci 4	Unit	Rp. 4.032.000
2.	LCD Proyektor /Infocus	LCD Proyektor Epson EB-W06	Unit	Rp. 10.080.000

ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Pengembangan Pertanian	Tanah Hitam, Pupuk Kompos, Polibek Ukuran 15 x15, 35 x 40, obat-obatan	Unit	Rp. 4.300.000
2	Penanganan Pasca Panen	Timbangan, Keranjang, Plastik Kemasan, dll	Unit	Rp. 1.000.000

ALAT PENDINGIN

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Exehause Fan	Ukuran 12 Inchi	Unit	Rp. 650.000

ALAT STUDIO LAINNYA

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Speaker Aktiv	Speaker Ukuran 15 Inchi	Unit	Rp. 12.500.000
2.	WebCam	Logitech WebCam BCC 950	Unit	Rp. 4.000.000
3	WebCam	Logic WebCam C 922 Pro Stream	Unit	Rp. 2.500.000
4	Televisi	Smart TV 60 Inchi	Unit	Rp. 16.000.000

BAHAN CETAK

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Cetak Karcis	Karcis Retribusi Non Bus Antar Kota dan Dalam Kota	Set	Rp. 5.000

BAHAN KOMPUTER

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Printer	Merk Epson Type L3210	Unit	Rp. 3.702.960

BAHAN LAINNYA

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Tanah dan Pupuk	Tanah Hitam dan Pupuk Kompos untuk Pembibitan	Unit	Rp. 1.250.000

BAHAN KIMIA PADAT

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Pupuk Tamah Sekam	Kompos NPK 16:16, Urea, Mulsa	Unit	Rp. 2.400.000

BAHAN BAKAR MINYAK

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Dexlite (Bio Solar)	Solar Non Subsidi	Liter	Rp. 12.400

BAHAN/BIBIT TANAMAN

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Benih Tanaman	Aneka Jenis Benih Tanaman Sayuran dan Buah	Unit	Rp. 1.000.000

BAHAN/BIBIT TERNAK

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Ternak Babi Betina	25 - 35 Kg	Ekor	Rp. 6.500.000
2	Ternak Babi Jantan	25 - 35 Kg	Ekor	Rp. 7.000.000

KOMPUTER

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Laptop	Core i7, RAM 8 Gb, SSD 512 Gb, Layar 14"	Unit	Rp. 14.560.000
2.	Desktop PC	Intel Core i5, RAM 8 Gb, 512 Gb SSD	Unit	Rp. 19.060.000

MEUBELAIR

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Kursi Putar	Kursi Putar Sandaran Kepala VIP	Unit	Rp. 3.400.000
2.	Kursi Putar	Kursi Putar Sandaran Kepala	Unit	Rp. 2.400.000

PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Rumah Bibit	Pembuatan Meja Bibit dan Penyimpanan Bibit Menggunakan Springkel dan Kebutuhan Lainnya	Unit	Rp. 750.000
2.	Peralatan Pembibitan	Alat Penggembur Tanah, Sarung Tangan, Polibek Kecil, dll	Unit	Rp. 300.000
3	Peralatan Pengairan	Pipa dan Springkel dan Kebutuhan Lainnya	Unit	Rp. 1.000.000
4	Peralatan Demplot	Rakitan Paralon Hidroponik dan Pompa Aquarium	Unit	Rp. 3.000.000

2. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
STANDAR SATUAN HARGA KONSTRUKSI TAHUN 2022
PLAT BESI DAN ALUMINIUM

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Plat Besi	Ukuran Tebal 3,0 mm	Lembar	Rp 1.300.000

PLAT BESI ESER

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Plat Besi Eser	Ukuran 122 cm x 244 cm, Tebal 1,2 mm, Berat 27,996 Kg	Lembar	Rp 600.000
2	Plat Besi Eser	Ukuran 122 cm x 244 cm, Tebal 1,5 mm, Berat 34,995 Kg	Lembar	Rp 1.000.000
3	Plat Besi Eser	Ukuran 122 cm x 244 cm, Tebal 2 mm, Berat 46,66 Kg	Lembar	Rp 1.050.000

SAMBUNGAN PIPA

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Check Valve	Diameter 4 Inchi	Pcs	Rp 1.800.000

CAT DINDING

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Cat Dinding	Cat Dinding/Cat Tembok Merk Nippon Paint Vinilex 5000, 25 Kg	Kaleng	Rp 728.000
2	Cat Dinding	Cat Dinding/Cat Tembok Merk Nippon Paint Vinilex Pro 1000, 25 Kg	Kaleng	Rp 504.000

PENUTUP ATAP SENG

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Seng Spandek	Tbl. 0,3 mm	M1	Rp 44.800
2	Rabung Seng Spandek	Uk. 240 x 45 cm Tbl 0,3 mm	M1	Rp 72.800

RANGKA ATAP BAJA RINGAN

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Reng Baja Ringan	Tasso, Baja Ringan Type TRMX (0,40-45)	Batang	Rp 90.720

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 23 Maret 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 23 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**


**RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si
PENATA PK. I
NIP. 19881107 201101 1 007**